

## KEGIATAN BERPOTENSI DATANGKAN KERUMUNAN DIIMBAU DITUNDA

# Pemkot Kedepankan Persuasif, Sanksi Bersifat Sosial

YOGYA (KR) - Instruksi yang dikeluarkan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun Kota Yogya belum mengatur secara jelas mengenai sanksi pelanggaran pembatasan kegiatan masyarakat. Pemkot Yogya pun lebih mengedepankan pendekatan persuasif sehingga penerapan sanksi bersifat sosial.

"Jangan sedikit-sedikit sanksi. Kita tidak bicara itu, tapi kalau sanksi ya biar sanksi sosial. Yang terpenting sekarang bagaimana kita semua bertanggung jawab untuk saling melindungi agar tidak ada yang sakit," tandas Walikota Yogya Haryadi Suyuti, Sabtu (9/1).

Menurutnya, instruksi yang ia teken dan disosialisasikan ke

masyarakat mengenai pengatasan secara terbatas kegiatan masyarakat selama dua pekan ke depan merupakan hasil tindak lanjut koordinasi lintas daerah di DIY. Secara garis besar hal itu pun merujuk dari instruksi Menteri Dalam Negeri dalam upaya mengendalikan laju Covid-19.

Berbagai kegiatan di masyarakat masih tetap diperbo-

lehkan namun harus menerapkan protokol secara ketat. Akan tetapi skema pembatasan seperti jam operasional hingga pukul 19.00 WIB serta kapasitas pengunjung maksimal 25 persen tetap menjadi persyaratan mutlak.

"Harapan kita, masyarakat bisa memahami aturan ini. Meskipun nantinya ada petunjuk dari Sat Pol PP, TNI mau-

pun Polri yang akan melakukan pengawasan. Jangan sampai ada yang melanggar untuk kita semua," tandas Haryadi.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi menambahkan, laju penambahan kasus Covid-19 selain banyak dari lingkungan keluarga juga berasal paparan perkantoran. Oleh karena itu kebijakan Work From Home (WFH) sebanyak 50 persen tidak hanya bagi kalangan perkantoran pemerintahan melainkan juga swasta. Teknis penerapannya pun disesuaikan dengan kebijakan masing-masing kantor.

Khusus Pemkot Yogya menerapkan sistem selang-seling bagi pegawai. Sementara itu, posko koordinasi untuk mengawasi kebijakan pembatasan tidak hanya berada di tingkat kota, melainkan turut dibangun hingga tingkat kecamatan. Setiap mantri pamong praja diberikan tanggung jawab mengawasi pengatasan secara terbatas kegiatan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

"Intinya adalah menghindari kerumunan. Makanya setiap kegiatan yang berpotensi mendatangkan kerumunan semen-

tara ditunda dulu," anjurnya.

Secara khusus Heroe, mengimbau agar aktivitas di luar rumah dikurangi. Kebijakan di tiap daerah pun sudah disamakan persepsinya agar masyarakat memiliki panduan yang jelas. Apalagi aktivitas di Kota Yogya intensitasnya dua kali lipat lebih dari penduduk Kota Yogya. Total penduduk Kota Yogya mencapai sekitar 450.000 jiwa, sedangkan warga yang beraktivitas mencapai 1,2 juta jiwa. Hal ini menjadi konsekuensi logis sebagai pusat perkotaan maupun ibukota provinsi. (Dhi)-d

## KPRI BAKTI MULIA GELAR RAT

# Koperasi Dituntut Miliki Sertifikat Nomor Induk

YOGYA (KR) - Seiring program rehabilitasi yang digulirkan pemerintah pusat, koperasi kini dituntut memiliki sertifikat nomor induk. Dari total 364 koperasi yang masih aktif di Kota Yogya, hingga akhir tahun 2020 tercatat sekitar 200 koperasi yang sudah mengantongi sertifikat tersebut.

"Masih banyak koperasi yang belum mengurus nomor induk. Ini yang sekarang kami dorong terus. Koperasi yang sudah memiliki nomor induk banyak mendapat kemanfaatan," tandas Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogya Sigit Dwinanto, di sela Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bakti Mulia di Kantor Kementerian Agama Kota Yogya, Sabtu (9/1).

Untuk mengakses sertifikat nomor induk koperasi bisa



KR-Ardhi Wahdan

**Kepala Kantor Kemenag Kota Yogya didampingi pengurus KPRI Bakti Mulia menyerahkan hadiah doorprize.**

mendatangi dinas maupun mendaftar secara online melalui laman depkop.go.id. Berkas yang sudah masuk dalam formulir pendaftaran selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan proses verifikasi oleh dinas. Dengan begitu, koperasi dipastikan dalam kondisi sehat dan peluang berkembang semakin besar.

Senada disampaikan Kepala Kantor Kemenag Kota Yogya Nur Abadi. Menurutnya, RAT yang digelar seiring pandemi harus tetap diambil sisi positifnya. Terutama menyangkut inovasi penggunaan teknologi informasi. Meski peserta tatap muka terbatas, namun ratusan anggota lain mampu mengikuti secara virtual. "Semoga

ke depan koperasi juga bisa melayani anggota maupun menjalankan usaha dengan basis teknologi," tandasnya.

Sementara Ketua KPRI Bakti Mulia Safroni, menjabarkan RAT kali ini merupakan yang ke-36 kalinya digelar. Setiap tahun pihaknya berkomitmen menggelar RAT pada Januari atau tidak berselang lama usai tutup buku. Total anggota saat ini mencapai 434 orang dengan aset Rp 16 miliar. Unit usaha meliputi simpan pinjam anggota serta warung. "Selama pandemi ini usaha warung ada kendala sehingga dihentikan dan kami hanya melayani titipan yang sifatnya bagi hasil," katanya.

Sedangkan untuk simpan pinjam, masa pandemi tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini karena pembayaran kredit dipotong dari gaji yang diterima anggota tiap bulan. (Dhi)-d

# Desa Mandiri Dorong Kesejahteraan Masyarakat

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X didampingi Wagub DIY Sri Paduka Paku Alam X, memimpin rapat koordinasi tentang pelaksanaan Desa Mandiri Budaya di Gedung Pracimasana Kompleks Kepatihan, Jumat (8/1). Gubernur mengharapkan, meski semua program dari masing-masing dinas memiliki nama sendiri, tetapi tetap mengacu kepada tema Desa Mandiri Budaya.

Untuk bantuan, menurut Gubernur, jangan berproses sama seperti bantuan APBD, baik tingkat satu atau tingkat dua maupun APBN untuk desa. Karena, harus melengkapinya dan berorientasi pada investasi. Sehingga selain bisa tepat sasaran juga dapat menggali potensi di wilayah masing-masing. Dengan begitu masyarakat dapat mengembangkan serta berinvestasi untuk masa depan. (Ria)-d

"Struktur pemerintahan hanya sampai desa, anggaran yang di desa juga dapat diberikan untuk padukuhan. Sehingga padukuhan juga dapat mempunyai bantuan sendiri-sendiri. Desa mandiri ini ditujukan untuk kemandirian masyarakat. Karena itu kewajiban kita untuk kesejahteraan dan juga memandirikan masyarakat," ungkap Sultan.

Dikatakan, dengan pelaksanaan desa mandiri diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesejahteraan pada rakyat. Untuk itu kebijakan strategi politik ekonomi juga harus diturunkan. "Transparansi bantuan yang diberikan kepada desa juga harus ditingkatkan. Mulai dari rincian biaya sehingga meminimalisasi anggaran yang tidak efektif, serta dapat memaksimalkan program yang akan dibuat untuk desa mandiri budaya," terangnya. (Ria)-d



Kegiatan bakti sosial membersihkan sampah di Pasar Piyungan.

KR-Sukro Riyadi



Sekretaris DPC PDIP Bantul, Hanung Raharjo memimpin kegiatan bersih masjid.

KR-Sukro Riyadi



Membersihkan jaringan irigasi.

KR-Sukro Riyadi



Joko Purnomo (kaos hitam) bersama Komandan SAR Parangtritis Ali Sutanta Jaka Saputra (kiri).

KR-Sukro Riyadi



Jajaran DPC PDIP Bantul membersihkan dan menyemprotkan disinfektan di sebuah gereja di Sedayu.

KR-Sukro Riyadi

# Kedepankan Rasa Simpati, Empati bagi Rakyat Bantul

"Dirgahayu ke -48, PDI Perjuangan, Indonesia Berkepribadian Dalam Kebudayaan," ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bantul, Joko Purnomo.

Puncak peringatan HUT ke-48 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) digelar Minggu (10/1) di Kantor DPC PDIP Kabupaten Bantul. Sejumlah kegiatan berorientasi membantu masyarakat dilaksanakan dengan protokol kesehatan (Prokes).

HUT PDIP tahun 2020 ini mengangkat tema 'Indonesia Berkepribadian dalam Kebudayaan'. Ketua DPC PDIP Kabupaten Bantul, Joko Purnomo didampingi Ketua Panitia Peringatan HUT ke-48 PDIP Bantul, Pramudiananto, Sekretaris DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Bantul, H Hanung Raharjo ST mengungkapkan, momentum HUT PDIP tahun 2020 banyak diisi dengan program bakti sosial di tengah-tengah masyarakat Bantul. "Kami dalam momentum ini jajaran PDIP Kabupaten Bantul

menggelar bakti sosial dalam bentuk membersihkan jaringan irigasi sekunder petani, membersihkan pasar, tempat ibadah, sampah di objek wisata hingga penyemprotan disinfektan. Semua itu kami lakukan sebagai perwujudan dari komitmen PDIP Bantul bermanfaat bagi rakyat Bantul," jelas Joko Purnomo. Beberapa pasar yang dibersihkan meliputi Pasar Piyungan, Pundong, Dlingo. Selain itu beberapa jaringan irigasi sekunder juga dibersihkan di antaranya di Pendowo Sewon, daerah irigasi Kamijoro Pandak serta daerah irigasi Blawong Jetis.

"Khusus tempat ibadah dari PDIP Perjuangan Bantul membersihkan Masjid Bedukan Pleret, Masjid Jami' Sedayu, Gereja Kristen Sedayu serta Gereja Ganjuran," ujar Joko Purnomo.

Tidak hanya itu saja, jajaran DPC PDIP Perjuangan Bantul juga ikut andil dalam membersihkan sampah di Pantai Parangtritis dan Pantai Depok.

Sabtu (9/1) malam di Kantor DPC PDIP Bantul dilaksanakan tirakatan dan pemotongan tumpeng. Kemudian Minggu (10/1), DPC PDIP Bantul Srikandi Perempuan partai mengadakan kegiatan menanam pohon di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Bantul meliputi Jalan Ringroad Timur Kabupaten Bantul kemudian juga di beberapa titik kawasan tempat wisata dan di lokasi yang akan dibangunnya sekolah partai di Pajangan. Kemudian dari unsur Baguna menyelenggarakan bakti sosial dengan melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa wilayah karena pandemi Covid-19.

"Minggu tanggal 10 Januari tahun 2021 kita akan mengikuti pidato ketua umum partai Ibu Megawati Soekarnoputri dan juga Bapak Presiden Joko Widodo dalam rangka pembukaan

rangkain hari ulang tahun PDI Perjuangan ke -48 yang diselenggarakan secara zoom meeting atau daring dan direncanakan Bantul yang akan mengikuti adalah 350 sampai dengan 500 kader partai," jelas Joko.

Terkait kegiatan ulang tahun, jajaran PDIP Bantul bertekad menerjemahkan tema 'Indonesia Berkepribadian dalam Kebudayaan'. "Kami akan mengedepankan bahwa PDI Perjuangan sebagai aset bangsa, asetnya rakyat Indonesia dan sebagai partai pemenang pemilu kita terus mengedepankan rasa simpati, empati kita kepada masyarakat Bantul," tambah Joko Purnomo.

Artinya bagaimana kebudayaan ini nantinya bisa dijadikan sebagai sebuah alat untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera berkeadilan dalam bingkai projotamansari yang sejahtera demokratis dan agamis. (Roy)-d



Membersihkan sampah di Parangtritis Kretek Bantul.

KR-Sukro Riyadi



Baguna DPC PDIP Bantul menyerahkan sembako bagi korban longsor di Dusun Ngablak Piyungan Bantul.

KR-Sukro Riyadi